

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN****UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **KARDIYONO**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI BESAR**
3. NHK : **885178**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.160.000.000**

1. Tanah Seluas 413 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. Tanah Seluas 415 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 561 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 546 m2 di KAB / KOTA CILACAP, Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 256 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 140.000.000**

1. MOBIL, RUSH MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 50C (T135HC) M/T. / SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	40.422.626
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.340.422.626
III. HUTANG	Rp.	122.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.218.022.626

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.